

IPEM4215

MODUL 01

Apa Itu Teori Politik?

Dra. Riaty Raffiudin, M.A., Ph.D.

Daftar Isi

Modul 01	1.1
Apa Itu Teori Politik?	
Kegiatan Belajar 1 Mengenal Teori Politik	1.4
Latihan	1.12
Rangkuman	1.13
Tes Formatif 1	1.14
Kegiatan Belajar 2 Komponen, Konsep, dan Pembentukan Teori Politik	1.17
Latihan	1.31
Rangkuman	1.33
Tes Formatif 2	1.33
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.36
Daftar Pustaka	1.37



Pendahuluan

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan sudah mengambil mata kuliah tersebut. Teori politik yang akan dibahas dalam modul ini adalah teori politik empiris yang diharapkan dapat digunakan mahasiswa untuk menganalisis fenomena-fenomena politik.

Dalam Modul 1 ini kita akan membahas tentang “Apa itu Teori Politik?” yang akan dibagi dalam dua Kegiatan Belajar (KB) seperti berikut.

- I. Mengetahui Teori Politik. KB ini akan menjelaskan tentang:
 1. paradigma sebagai cara pandang pembentukan teori politik;
 2. perbedaan teori politik dengan filsafat dan ideologi politik.
- II. Komponen, Konsep, dan Pembentukan Teori Politik. KB ini menjelaskan tentang:
 1. komponen dalam teori politik;
 2. konsep utama dalam teori politik;
 3. pembentukan teori politik;
 4. kritik untuk pengembangan teori politik dan pilihan teori politik.

Capaian pembelajaran umum setelah mempelajari Modul 1 ini mahasiswa dapat menjelaskan tentang ruang lingkup teori politik. Sedangkan capaian pembelajaran secara khusus, mahasiswa diharapkan dapat:

1. mengenal dan memahami teori politik dengan mempelajari pembentukannya melalui paradigma-paradigma yang berbeda;
2. membedakan antara teori politik yang empiris dengan filsafat dan ideologi politik;
3. memahami dan menjelaskan komponen-komponen dan konsep-konsep yang membentuk teori;
4. memahami dan menjelaskan perlunya kritik dan penelitian untuk pengembangan teori-teori politik sehingga dapat menjelaskan fenomena-fenomena sosial-politik baru;
5. memahami pemilihan teori-teori yang dibahas dalam mata kuliah ini.

Mengenal Teori Politik

Pada sebuah diskusi atau perdebatan, sering kita mendengar seorang pembicara atau peserta aktif dikritik oleh peserta diskusi lainnya karena pembicara tersebut terlalu teoritis. Secara akal sehat, pernyataan ‘terlalu teoritis’ dapat diartikan sebagai ‘terlalu abstrak’ atau ‘terlalu mengawang-awang’ sehingga belum dapat menjelaskan fenomena atau fakta yang terjadi.

Bila kita merenungkan paragraf di atas ini, terdapat beberapa konsep penting yang dapat ditarik dari pengamatan sederhana yang terjadi dalam diskusi itu; konsep-konsep penting itu seperti: ‘teoritis’, ‘abstrak’, ‘fenomena’ dan ‘fakta’. Keempat konsep ini merupakan ‘pintu masuk’ untuk mengerti tentang teori. Secara mudah, kita dapat mengatakan bahwa teori adalah sesuatu yang abstrak dan berbeda dari fenomena serta fakta yang konkret sifatnya. Meskipun pengertian itu sudah memberikan petunjuk yang benar tentang apa itu teori, tetapi pengertian tersebut belumlah lengkap mendefinisikan teori. Dalam Kegiatan Belajar 1 ini akan dibahas tentang mengenal asal-muasal teori politik. Kegiatan Belajar ini akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Paradigma sebagai cara pandang pembentukan teori politik.
2. Perbedaan teori politik dengan filsafat dan ideologi politik.

A. PARADIGMA SEBAGAI CARA PANDANG PEMBENTUKAN TEORI POLITIK

Sebelum kita mempelajari apa itu teori dalam ilmu politik atau yang kita singkat dengan teori politik, kita perlu sedikit mengingat kembali tentang fokus yang dipelajari dalam ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tentang kekuasaan dan relasi-relasi kuasa, baik dalam lembaga, maupun di luar lembaga, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sebagai contoh untuk menjelaskan dan menganalisis negosiasi tuntutan pemerintah Indonesia agar PT Freeport McMoran mendivestasi 51% sahamnya, mahasiswa ilmu politik haruslah berpikir, teori apa yang harus dipilih dan dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini.

Sebelum membahas tentang apa itu teori politik dan bagaimana memilih teori tersebut, mahasiswa akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan paradigma dan pendekatan sebagai fondasi untuk memahami teori. Paradigma menurut Thomas Kuhn (1970) adalah “seperangkat keyakinan dasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama (atau) sebuah pandangan dunia yang mendefinisikan keadaan/kualitas dari

dunia”. Dengan mendasarkan pada definisi ini maka fungsi paradigma adalah untuk menjelaskan asumsi-asumsi dasar, pertanyaan-pertanyaan penting atau “teka-teki” yang harus dijawab, metode penelitian yang harus digunakan untuk mendefinisikan keadaan, atau kualitas dari ‘dunia’, atau realitas sosial yang dilihatnya.

Terdapat tiga paradigma yang menjadi dasar melihat fenomena dalam ilmu politik. Ketiga paradigma itu adalah paradigma positivis (*positivist paradigm*), paradigma konstruktivis (*constructivist paradigm*), dan paradigma kritis (*critical social science paradigm*). Dengan adanya ketiga paradigma tersebut, secara sederhana, dapatlah dikatakan fenomena yang sama di dalam ilmu politik dapat dijelaskan dari tiga sudut pandang yang berbeda. Tabel 1.1 memperlihatkan perbedaan ketiga paradigma tersebut dalam memahami ‘dunia’ atau realitas sosial, manusia, alasan meneliti, dan teori yang dihasilkan dan digunakan.

Tabel 1.1
Perbedaan Paradigma Positivisme, Konstruktivisme, dan Kritis dalam Ilmu Sosial

Fokus	Paradigma Positivisme	Paradigma Konstruktivisme	Paradigma Kritis
“Dunia”	“Dunia” dilihat sebagai pola-pola yang stabil atau mendasarkan pada aturan-aturan alam.	“Dunia” dilihat sebagai situasi sosial yang diciptakan dari interaksi yang sangat cair di antara manusia.	Dunia” dilihat sebagai keberadaan realitas sosial penuh dengan konflik dan ditentukan oleh struktur-struktur di bawahnya yang tersembunyi.
Manusia	Manusia adalah individu-individu yang memikirkan kepentingan sendiri dan rasional yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan eksternal.	Manusia sosial lah yang menciptakan arti dan yang secara konstan memberi arti terhadap dunia-dunia mereka.	Manusia adalah individu-individu yang kreatif dan adaptif, tetapi tidak sadar akan potensinya, yang terjebak oleh ilusi dan eksploitasi.
Alasan Meneliti	Untuk menemukan hukum alam sehingga orang dapat memprediksi dan mengontrol kejadian-kejadian.	Untuk memahami dan mendeskripsikan tingkah laku dan fenomena sosial yang penuh makna.	Untuk mematahkan mitos-mitos dan memperkuat serta mengubah masyarakat secara radikal.
Teori yang Dihasilkan dan Digunakan	Terkaitnya definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan hukum-hukum yang logis yang dihasilkan secara deduktif.	Sebuah deskripsi tentang bagaimana <i>meaning system</i> dari sebuah kelompok dihasilkan dan bertahan.	Sebuah kritik yang memunculkan kondisi-kondisi yang sesungguhnya dan membantu masyarakat untuk melihat cara membentuk dunia yang lebih baik.

Sumber: W.L. Neuman, 1997, *Social Research Methods, 3rd ed., Allyn & Bacon, bab 4, h. 83, tabel 4.1. dengan modifikasi.*

Tabel 1.1 memperlihatkan bagaimana perbedaan tiga paradigma dalam memperlihatkan empat aspek yang sama: ‘dunia’ atau realitas sosial, manusia, alasan untuk melakukan penelitian, serta teori yang dihasilkan dan digunakan. Perbedaan cara pandang dari tiap paradigma terhadap aspek yang sama inilah yang mendasari munculnya pendekatan (*approach*) dan teori yang berbeda.

Seperti yang sudah disinggung di bagian awal, paradigma merupakan seperangkat keyakinan tentang prinsip-prinsip dasar untuk memahami realitas sosial. Karena paradigma merupakan sebuah sistem keyakinan yang sangat luas cakupannya, tiap paradigma memiliki beberapa pendekatan (*approach*) yang kemudian menurunkan teori-teori sebagaimana dalam Modul 2, penjelasan tentang pendekatan akan dibahas secara mendetail; secara singkat dapatlah dikatakan bahwa pendekatan adalah perbedaan cara untuk melihat dan meneliti fenomena sosial politik yang akan menghasilkan analisis dan kesimpulan yang berbeda. Sebagai contoh, paradigma positivisme menurunkan beberapa pendekatan seperti pendekatan tingkah laku dan *rational choice*. Paradigma konstruktivis menurunkan beberapa pendekatan seperti pendekatan budaya dan interaksionis-simbolisme. Sedangkan paradigma kritis menurunkan pendekatan feminis dan pendekatan kelas. Tujuan dari memahami paradigma dan pendekatan ini adalah agar kita dapat menyeleksi masalah-masalah, teori yang digunakan, metode pengumpulan data yang relevan, serta menentukan data yang akan dianalisis, dan data mana yang dikesampingkan (Van Dyke 1960 sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo 2008; Marsh and Stoker 1995).

Sampailah kita pada penjelasan tentang teori politik yang merupakan derivasi yang lebih spesifik dari pendekatan-pendekatan dari tiap paradigma. Teori itu adalah sebuah pernyataan umum yang mendeskripsikan dan menjelaskan sebab dan akibat dari sebuah fenomena sosial dan politik (Van Evera, 1997, h.10). Pernyataan umum itu biasanya berisi definisi yang tepat dan jelas dari konsep-konsep kunci (biasa juga disebut sebagai proposisi) serta hubungan antar konsep-konsep tersebut. Dari penjelasan terhadap konsep-konsep kunci tersebut maka akan terbangun kaitan secara logis antara konsep dengan realitas empiris. Secara lebih mendetail, Miriam Budiardjo (2008, h. 43) mendefinisikan teori politik sebagai bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain,

“Teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.”

Jika kita kembali lagi dengan contoh yang disinggung di bagian awal, yaitu tentang negosiasi antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport McMoran dalam hal pemerintah Indonesia menuntut 51% saham di PT Freeport, bagaimana mahasiswa menentukan teori apa yang tepat untuk dapat menjelaskan fenomena ini? Sebelum menentukan teori, mahasiswa harus menetapkan posisinya dalam paradigma. Misalnya, mahasiswa tersebut memiliki paradigma positivisme maka ia memiliki asumsi bahwa

baik pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, maupun CEO Freeport McMoran adalah individu yang rasional. Karena itu, dimungkinkan untuk menjelaskan fenomena ini melalui pendekatan rasional dengan teori *public choice*, atau teori *collective action* (kedua teori ini akan menjadi salah satu bahasan pada Modul 5 Teori Pilihan Rasional). Contoh yang menjelaskan secara singkat bagaimana pemilihan teori ini memang agak menyederhanakan proses pemilihan teori. Namun, hal yang ingin diperlihatkan dalam contoh tersebut adalah bahwa ketika mahasiswa memilih teori untuk menjelaskan fenomena sosial politik, ia tidak boleh sewenang-wenang dan harus mengerti dasar dalam pemilihannya.

Pentingnya pemahaman dan pemilihan teori politik juga berkaitan dengan fungsi dari teori itu. Menurut Neumann (2014) dan Effendi (1981) terdapat lima fungsi teori sebagai berikut.

1. Mengklasifikasikan berbagai hal seperti entitas, proses, dan hubungan kausal.
2. Menjelaskan keteraturan atau regularitas yang terjadi.
3. Memprediksi hubungan dari fenomena yang sedang diamati.
4. Memberikan arah bagi penelitian yang sedang dilakukan.
5. Memberikan dasar norma atau moral untuk bertindak.

Fungsi-fungsi ini kemudian dirangkum menjadi dua fungsi teori secara umum, yaitu, *pertama*, fungsi sebagai dasar norma atau moral bagi perilaku politik termasuk bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. *Kedua*, fungsi sebagai alat analisis atau *tools of analysis* dari fenomena-fenomena politik yang sedang terjadi ketika di dalamnya termasuk untuk mengklasifikasi fenomena, menjelaskan keteraturan dari fenomena yang terjadi, memprediksi fenomena yang akan terjadi, dan mengarahkan penelitian tentang fenomena baru.

Sejalan dengan kedua fungsi teori secara umum tersebut, Thomas P. Jenkin (1967) sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (2008) dan Landman (2000) membedakan dua jenis teori politik kedalam *valuational theories* dan *empirical theories*, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. Perbedaan kedua jenis teori tersebut didasarkan pada adanya nilai (*value*) yang terkandung dalam teori politik tersebut.

Pertama, teori politik yang termasuk dalam kategori *valuational theories* adalah teori yang mendasarkan pada norma, moral, dan nilai sehingga dapat menentukan norma-norma untuk perilaku politik (*norms for political behavior*). Karena adanya unsur norma-norma dan nilai maka teori-teori ini dinamakan *valuational* (mengandung nilai). Filsafat politik dan ideologi politik termasuk dalam *valuational theories*. Contoh teori jenis ini adalah filsafat politik dari para pemikir kontrak sosial yang terdiri atas Hobbes, Locke, Rousseau (akan dibahas dalam Modul 3 Teori Negara dan Modul 9 Demokrasi dan Representasi). Berbeda dengan filsafat politik, ideologi politik menggunakan pemikiran atau filsafat politik sebagai dasar dari sebuah gerakan. Contoh yang sering digunakan adalah ideologi komunisme dan sosial demokrat yang banyak digunakan di berbagai negara untuk menggerakkan masyarakat atau pun sebagai dasar bagi pendirian partai politik.

Kedua, teori politik yang termasuk dalam kategori *empirical theories* merupakan jenis teori politik yang “membangun hubungan-hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep dalam usaha untuk menjelaskan terjadinya fenomena politik yang diamati.” (Landman 2000, h. 15). Apabila dikontraskan dengan jenis teori dalam kategori pertama, norma-norma bukan menjadi prioritas pembahasan dalam teori-teori kategori ini. Prioritas dari teori ini adalah untuk menjelaskan fenomena sosial dan politik agar dapat memberikan generalisasi-generalisasi. Karena itu, teori dalam kategori ini biasanya menggunakan tahapan-tahapan seperti mendeskripsikan, mengklasifikasikan lalu mengomparasikan fenomena sosial dan politik untuk kemudian disistematisasi dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Erat kaitannya dengan jenis *empirical theories*, terdapat apa yang disebut dengan tingkatan dari teori atau *levels of theory* dari *empirical theories* ini (<https://www.ssc.wisc.edu/~jpiliavi/357/theory.white.pdf>). Tingkatan teori yang memperlihatkan luasnya cakupan teori tersebut terdiri atas 3 (tiga) tingkatan:

1. *Grand theory* atau teori makro.
2. *Middle range theory* atau teori meso atau menengah.
3. *Close to data theory* atau *grounded theory*.

Teori-teori yang akan dibahas dalam BMP ini merupakan teori-teori dalam tingkatan *grand theory* dan *middle range theory* dengan alasan seperti penjelasan berikut ini.

Terminologi *grand theory* pertama kali digunakan oleh John Stuart Mill (1959). *Grand theory* merupakan bentuk abstraksi teori yang tertinggi ketika pengorganisasian dan pengaturan konsep-konsep lebih menjadi prioritas daripada memahami dunia sosial. Dengan perkataan lain, *grand theory* memiliki cakupan luas, yang memberikan pemahaman secara umum tentang subjek inti, tentang masalah-masalah penting untuk diteliti dan metode yang digunakan. Pengertian *grand theory* seperti ini memiliki kesamaan dengan pengertian pendekatan yang telah disinggung di bagian awal, yaitu sebagai perbedaan cara untuk melihat dan meneliti fenomena sosial politik yang akan menghasilkan analisis dan kesimpulan yang berbeda pula. Beberapa contoh tentang *grand theory* yang dapat disebutkan di sini adalah Teori Struktur Kelas dari Marx, Teori Struktur dan Fungsi dari Gabriel Almond, Teori Sistem Politik dari David Easton, dan *rational choice theory*. Contoh-contoh *grand theory* yang disebutkan ini dapat disejajarkan dengan apa yang disebut sebagai pendekatan (yang akan menjadi pembahasan dari bahasan Modul 2).

Salah satu perbedaan penting antara *grand theory* dan *middle range theory* adalah bahwa *grand theory* tidak dapat diuji keberlakuannya karena sangat tingginya abstraksi yang dimiliki sehingga jauh dari realitas empiris yang dijelaskan. *Middle range theory* adalah teori-teori yang diturunkan dari *grand theory* atau pendekatan tersebut. Beberapa contoh *middle range theory* adalah Teori Negara dari Perspektif Elit, *Game Theory*, dan Teori Representasi Politik.

Tingkatan teori yang ketiga adalah *close to data theory*. Teori jenis ini tidak dibahas di dalam modul ini karena pembentukan teori ini memerlukan pemahaman tersendiri tentang *grounded theory* yang merupakan salah satu bentuk desain penelitian metodologi kualitatif. Namun, secara singkat dapat dikatakan bahwa teori yang dihasilkan merupakan usaha mengabstraksikan temuan data empiris, karena itulah disebut sebagai *grounded theory*. Penggunaan metodologi *grounded theory* ini banyak digunakan dalam ilmu kedokteran dan etnografi (Creswell 2014).

Teori-teori politik yang dibahas dalam Buku Materi Pokok ini adalah teori-teori yang masuk dalam kategori *empirical theories* (Landman 2000) dengan tingkatan *grand theory* dan *middle range theory*. Dengan perkataan lain, BMP tidak membahas teori-teori politik yang sifatnya normatif seperti filsafat politik dan ideologi politik. Salah satu alasan membatasi pada teori politik empiris adalah berkaitan dengan fungsi dari teori politik, yaitu untuk mendorong mahasiswa menggunakan teori-teori tersebut sebagai *tools of analysis* terhadap fenomena sosial politik masa kini. Dengan menggunakan teori-teori untuk menganalisis, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan arti dari fenomena tersebut, ataupun dapat membuktikan keberlakuan teori tersebut melalui fenomena sosial politik yang dijelaskannya.

Perlu juga diingat, bahwa teori-teori politik yang dibahas dalam BMP ini memenuhi kriteria kebaikan dari sebuah teori. Menurut Van Avera (1997) terdapat tujuh atribut yang menjadikan sebuah teori menjadi sebuah teori yang baik. Ketujuh atribut itu sebagai berikut (Van Evera 1997, h. 17-21).

1. Mempunyai kekuatan penjelasan secara luas (*large explanatory power*).
2. Sederhana (*parsimonious*).
3. Selalu “memuaskan” rasa penasaran dan tidak menyisakan pertanyaan apa yang ditimbulkan/diajukan oleh teori.
4. Memiliki struktur secara jelas agar dapat melakukan prediksi, menguji, atau menerapkan teori ini pada situasi yang konkret.
5. Prinsip *falsifiable* yang secara tegas dapat memprediksi.
6. Menjelaskan fenomena penting dan menjawab pertanyaan orang banyak.
7. Mempunyai kekayaan fungsi (*prescriptive*) yang dapat dijadikan arahan, solusi, atau rekomendasi.

B. PERBEDAAN TEORI POLITIK DENGAN FILSAFAT POLITIK DAN IDEOLOGI POLITIK

Mahasiswa yang mempelajari teori politik sering menjadi bingung dengan cakupan teori politik yang berbeda-beda. Sebagaimana disinggung sebelumnya, pengategorian teori politik ke dalam teori yang berlandaskan nilai (*valuational theories*) dan teori yang tidak berlandaskan nilai (*value-free theories* atau *empirical theories*) membuat cakupan teori politik menjadi sangat luas. Cakupan yang luas tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang mahasiswa mengerti perbedaan jenis teori

dari dua kategori tersebut. Hal yang sering terjadi adalah mahasiswa menyamakan antara teori-teori empiris dengan filsafat atau pun ideologi politik. Penyamaan inilah yang harus dihindari karena pemahaman seperti itu tidak tepat. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengerti lebih jauh perbedaan antara filsafat politik (kadang-kadang disebut juga pemikiran politik), teori politik empiris, dan ideologi politik.

1. Perbedaan Filsafat Politik dengan Teori Politik Empiris

Secara harafiah filsafat diterjemahkan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan yang diperoleh dari perenungan atau kontemplasi untuk mencari kebenaran (Macridis 1983). Dalam ilmu politik, filsafat politik lebih diartikan sebagai sebuah cabang ilmu yang berusaha mencari penjelasan berdasarkan rasio tentang metafisika dan hakikat mendapatkan ilmu pengetahuan (epistemologi). Oleh karena itu, penjelasannya mengaitkan antara hubungan, antara sifat, dan hakikat dari alam semesta dengan dunia fana (Budiardjo 2008).

Perbedaan yang nyata dari filsafat politik dan teori politik yang empiris adalah bahwa filsafat politik lebih memberikan landasan keberadaan fenomena yang normatif. Sebaliknya, jauh dari tujuan normatif, teori empiris justru menjelaskan fenomena dengan melihat hubungan sebab akibat atau pun memaknai fenomena tersebut.

Salah satu filsuf Yunani yang terkenal adalah Plato. Plato menulis tentang *The Republic*, sebuah negara ideal yang dipimpin oleh seorang *philosopher king* yang secara sengaja memisahkan diri dari hak milik dan ikatan keluarga supaya dapat memerintah untuk mencapai kepentingan bersama. Salah satu pemikiran Plato yang banyak dikutip orang adalah tentang keadilan. Menurut Plato, keadilan merupakan hakikat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik seperti yang dicita-citakan. Oleh karena itu, untuk dapat menanggulangi masalah ketidakadilan dan persoalan-persoalan politik lainnya di dunia fana, manusia haruslah memecahkan terlebih dahulu persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta, misalnya keseimbangan alam.

Selanjutnya, mengenai pembagian dalam filsafat politik, Magnis-Suseno, berbeda dengan Miriam Budiardjo dalam menetapkan pembagian tersebut. Menurut Magnis-Suseno (1983, h.12) filsafat terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis (etika). Filsafat teoritis mempertanyakan “apa yang ada” seperti mempertanyakan hakikat manusia, hakikat alam, hakikat realitas sebagai keseluruhan, hakikat pengetahuan atau pun hakikat Yang Transenden (Magnis-Suseno 1983, h. 12). Sedangkan filsafat praktis atau etika mempertanyakan “apa yang harus manusia lakukan terhadap yang ada itu”. Dengan begitu, filsafat praktis atau etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia (Magnis-Suseno 1983, h. 13).

Berbeda dengan Magnis-Suseno, Miriam Budiardjo (2008) yang mengutip Jenkin (1967) tidak membagi filsafat ke dalam kedua kelompok tersebut. Menurut Budiardjo, filsafat politik dilanjutkan dengan apa yang disebut teori politik yang sistemis (*systemic political theory*). Sebagaimana dikatakan oleh Budiardjo (2008), teori politik yang

sistemis ini tidak memajukan pandangan sendiri tentang metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Teori-teori politik semacam ini merupakan langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menetapkan norma-norma (tanpa mempertanyakan asal-muasal norma tersebut) dalam kegiatan politik. Sebagai contoh pada abad ke-19 teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan adanya sistem hukum serta sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. Pembahasan teori-teori politik itu mendasarkan pandangan mengenai adanya hukum alam – sebuah pandangan yang sudah lazim pada saat itu. Hanya saja, teori-teori politik itu tidak lagi mempersoalkan lagi hukum alam tersebut. Contoh yang telah disebutkan di bagian 1 adalah teori kontrak sosial dari Hobbes, Locke, dan Rousseau.

2. Ideologi Politik

Ideologi politik didefinisikan oleh Miriam Budiardjo adalah sebagai (2008):

“himpunan nilai, ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya”.

Ideologi politik yang berisi nilai-nilai dan ide-ide membingkai cara berpikir dan perilaku politik seseorang yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (Macridis 1983, h. 4). Sumber dari ideologi politik, tidak lain dan tidak bukan adalah filsafat politik dan teori politik. Masyarakat yang telah percaya terhadap nilai-nilai atau ide-ide tertentu memaksakan teori politik ataupun filsafat politik yang mengandung nilai-nilai tersebut untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat tersebut. Sering kali ideologi politik yang terbentuk memiliki bentuk yang sangat sederhana, kadang-kadang terdistorsi dari sumber-sumbernya.

Diakui oleh Macridis bahwa sangat sulit untuk dimengerti kapan dan dalam lingkungan apa sebuah teori politik atau pun filsafat politik mentransformasi menjadi sebuah ideologi politik. Dengan perkataan lain, adalah tidak mudah menjelaskan kapan transformasi dari teori atau filsafat politik terjadi dan menjadi sebuah dasar bagi gerakan yang berorientasi pada tindakan (*action-oriented movement*). Selanjutnya, Macridis menjelaskan bahwa ideologi politik memiliki beberapa fungsi (Macridis 1983, h. 9-13). Secara umum, ideologi politik sebagai seperangkat ide dan kepercayaan yang dianut oleh sejumlah orang atau kelompok masyarakat ini menentukan apa yang bernilai apa yang tidak, apa yang dijaga keberlangsungannya, apa yang harus diubah, tentu saja membentuk pemikiran perilaku serta tindakan-tindakan politik dari kelompok masyarakat yang menganut ideologi politik tersebut. Dengan perkataan lain, ideologi selain memprovokasi, ia juga memberikan kerangka kerja yang mendasar bagi tindakan-tindakan politik tersebut.

Secara lebih khusus, ideologi politik memiliki fungsi-fungsi seperti (1) memberikan legitimasi, (2) sarana memobilisasi dan membentuk solidaritas, (3) memperlihatkan pentingnya pimpinan untuk memanipulasi pesan-pesan yang ingin disampaikan, (4) sarana untuk berkomunikasi dan berekspresi, dan (5) sebagai landasan bagi tindakan politik. Fungsi-fungsi ideologi politik ini tergambarkan dengan baik oleh Hitler ketika ia menjabat sebagai *Chancellor of Germany* (pimpinan Jerman) dan mempropagandakan Nazi sebagai ideologi terbaik bagi rakyat Jerman (Macridis 1983, h. 172-198).

Selain memiliki fungsi, ideologi politik dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan sebagai berikut.

- a. Ideologi yang mempertahankan *status quo*
Ideologi ini mempertahankan dan merasionalisasikan keteraturan-keteraturan ekonomi, sosial, dan politik dalam waktu tertentu dan dalam masyarakat apa pun.
Contoh: Liberalisme, Komunisme di Republik Rakyat Tiongkok.
- b. Ideologi radikal atau ideologi yang revolusioner
Ideologi ini mengadvokasi perubahan-perubahan yang menyeluruh dan secara intensif serta revolusioner.
Contoh: Marxisme, Fasisme.
- c. Ideologi reformis
Ideologi ini mengadvokasikan perubahan-perubahan secara bertahap.
Contoh: *Developmentalism*.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian teori politik menurut Miriam Budiardjo!
- 2) Jelaskan kegunaan ideologi politik!
- 3) Jelaskan perbedaan filsafat politik dan teori politik empiris!
- 4) Jelaskan perbedaan antara *grand theory* dan *middle range theory*!
- 5) Jelaskan apa yang dimaksud dengan *valuational theories* dan *empirical theories*?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Teori Politik menurut Miriam Budiardjo “Teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.”

- 2) Secara lebih khusus, ideologi politik memiliki fungsi-fungsi seperti (1) memberikan legitimasi, (2) sarana memobilisasi dan membentuk solidaritas, (3) memperlihatkan pentingnya pimpinan untuk memanipulasi pesan-pesan yang ingin disampaikan, (4) sarana untuk berkomunikasi dan berekspresi, dan (5) sebagai landasan bagi tindakan politik.
- 3) Perbedaan yang nyata dari filsafat politik dan teori politik yang empiris adalah bahwa filsafat politik lebih memberikan landasan keberadaan fenomena yang normatif. Sebaliknya, jauh dari tujuan normatif, teori empiris justru menjelaskan fenomena dengan melihat hubungan sebab akibat ataupun memaknai fenomena tersebut.
- 4) Perbedaan *grand theory* dan *middle range theory* adalah bahwa *grand theory* tidak dapat diuji keberlakuannya karena sangat tingginya abstraksi yang dimiliki sehingga jauh dari realitas empiris yang dijelaskan. *Middle range theory* adalah teori-teori yang diturunkan dari *grand theory* atau pendekatan tersebut. Beberapa contoh *middle range theory* adalah teori negara dari perspektif elit, *game theory*, dan teori representasi politik.
- 5) *Valuational theories* adalah teori yang mendasarkan pada norma, moral, dan nilai sehingga dapat menentukan norma-norma untuk perilaku politik (*norms for political behavior*). Karena adanya unsur norma-norma dan nilai maka teori-teori ini dinamakan *valuational* (mengandung nilai). Filsafat politik dan ideologi politik termasuk dalam *valuational theories*. Sedangkan *empirical theories* merupakan jenis teori politik yang “membangun hubungan-hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep dalam usaha untuk menjelaskan terjadinya fenomena politik yang diamati.” Teori dalam kategori ini biasanya menggunakan tahapan-tahapan seperti mendeskripsikan, mengklasifikasikan, lalu mengomparasikan fenomena sosial dan politik, untuk kemudian disistematisasi dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.



Rangkuman

1. Tiga paradigma yang menjadi dasar melihat fenomena dalam ilmu politik adalah paradigma positivis (*positivist paradigm*), paradigma konstruktivis (*constructivist paradigm*), dan paradigma kritis (*critical social science paradigm*).
2. Tujuan dari memahami paradigma dan pendekatan ini adalah agar kita dapat menyeleksi masalah-masalah, teori yang digunakan, metode pengumpulan data yang relevan, serta menentukan data yang akan dianalisis dan data mana yang dikesampingkan.
3. Filsafat politik, teori politik empiris, dan ideologi politik merupakan jenis-jenis dari teori politik.
4. Hal yang membedakan teori politik empiris dengan filsafat dan ideologi politik adalah masalah nilai. Filsafat dan ideologi politik adalah teori politik yang sarat nilai, oleh karena itu terutama filsafat politik biasa digunakan sebagai dasar norma

dalam berperilaku atau pun kehidupan bernegara. Sedangkan teori politik empiris tidak sarat nilai, melainkan menjelaskan fenomena dengan melihat hubungan sebab akibat atau memaknai fenomena tersebut.

5. Sumber dari ideologi politik, tidak lain dan tidak bukan adalah filsafat politik dan teori politik. Masyarakat yang telah percaya terhadap nilai-nilai atau ide-ide tertentu memaksakan teori politik atau pun filsafat politik yang mengandung nilai-nilai tersebut untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat tersebut. Sering kali ideologi politik yang terbentuk memiliki bentuk yang sangat sederhana, kadang-kadang terdistorsi dari sumber-sumbernya.



Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Faktor yang mendasari perbedaan utama penggolongan teori politik ke dalam *valuational theories* dan *empirical theories* terletak pada unsur
 - A. kepentingan
 - B. nilai
 - C. kekuasaan
 - D. sikap

- 2) Adolf Hitler mengagitasi masyarakat Jerman untuk mempercayai bahwa Ras Aria merupakan ras yang tertinggi di dunia. Usaha yang dilakukan oleh Hitler ini adalah usahanya untuk menyebarkan
 - A. filsafat politik
 - B. teori politik
 - C. ideologi politik
 - D. norma politik

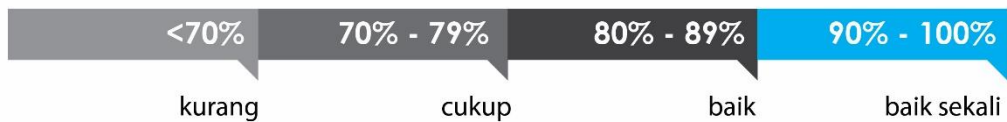
- 3) Cara berpikir induktif dan deduktif sangat berperan dalam pembentukan teori. Bila cara berpikir sampai pada kesimpulan-kesimpulan teori dengan menerapkan argumentasi atau alasan terhadap premis-premis yang diajukan, ilmuwan politik tersebut menggunakan cara berpikir
 - A. deduktif
 - B. induktif
 - C. metodologis
 - D. kausalitas

- 4) Seorang mahasiswa menggunakan teori sistem politik David Easton untuk membandingkan dua sistem politik, yaitu sistem politik Thailand dan Burma untuk melihat sistem politik manakah yang lebih demokratis. Kegiatan yang sedang dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah membuat
- A. generalisasi terhadap fenomena-fenomena demokratisasi di Thailand dan Burma
 - B. hipotesis bahwa sistem politik Thailand lebih demokratis dari sistem politik Burma
 - C. menentukan variabel-variabel apa saja yang diperlukan untuk membuat generalisasi
 - D. analisis terhadap institusi-institusi politik yang mendukung demokratisasi
- 5) Pernyataan berikut ini yang **tidak tepat** tentang filsafat, ideologi, dan teori politik adalah....
- A. sumber dari ideologi politik, tidak lain dan tidak bukan, adalah filsafat politik dan teori politik
 - B. sangat mudah untuk mengerti kapan dan dalam lingkungan apa yang dapat mentransformasi sebuah teori politik atau pun filsafat politik menjadi sebuah ideologi politik
 - C. para ideolog mampu memaksakan teori politik atau pun filsafat politik untuk diterapkan dalam masyarakat dan menjadikan landasan untuk melakukan gerakan yang berorientasi tindakan (*action-oriented movement*)
 - D. filsafat politik biasanya digunakan untuk menjadi dasar norma dalam berperilaku atau pun kehidupan bernegara

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Komponen, Konsep, dan Pembentukan Teori Politik

Pada Kegiatan Belajar 1 sebelumnya kita telah mengenal teori politik. Pada Kegiatan Belajar 2 ini kita akan membahas pembentukan teori politik melalui komponen dan konsep. Bagian ini merupakan bagian yang sangat menantang baik bagi penulis modul maupun bagi mahasiswa. Menantang bagi penulis modul karena diperlukan usaha yang besar untuk menjelaskan pembentukan teori secara sangat sederhana. Selain itu, penulis modul akan mengajak mahasiswa bukan saja dapat memahami teori-teori politik; namun juga mendorong mahasiswa mengerti penggunaan teori-teori tersebut untuk menganalisis fenomena-fenomena politik yang mereka kaji sebagai *tools of analysis*. Dalam tahap penggunaan teori juga melibatkan kemampuan mengkritik teori tersebut. Namun, kemampuan mengkritik teori baru akan dimiliki mahasiswa Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan di semester-semester berikutnya. Karena itu, dalam modul ini kritik terhadap teori hanya akan diperlihatkan melalui kritik-kritik yang diberikan para teoritis Ilmu Politik terhadap teori-teori yang telah mapan.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa pembentukan teori-teori politik secara deduktif dan induktif ini berkaitan erat dengan metode yang digunakan, kuantitatif ataupun kualitatif. Sering dikatakan bahwa teori politik yang dibentuk secara induktif dengan menggunakan metode kualitatif tidaklah sebaik teori politik yang dibentuk secara deduktif dengan menggunakan kedua cara berpikir dan metode kuantitatif. Pernyataan tersebut sama sekali tidak tepat karena kedua cara berpikir dan kedua metode tersebut sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan teori-teori politik.

Setelah mempelajari konsep-konsep teori politik, secara khusus mahasiswa diharapkan dapat sbb.

1. Menjelaskan dan menggunakan komponen-komponen teori politik seperti konsep variabel, hipotesis, inferensi, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
2. Menjelaskan dan menggunakan konsep-konsep yang membentuk teori-teori politik yang akan diperdalam pada mata kuliah ini. Konsep-konsep itu mencakup antara lain kekuasaan, wewenang dan legitimasi, negara, kelas, elit, pilihan-pilihan rasional, modernisasi, pembangunan, ketergantungan, *civil society*, gerakan sosial baru, feminisme, transisi demokrasi, representasi dan demokrasi.
3. Menjelaskan pembentukan teori empiris dengan konsep-konsep atau variabel-variabelnya yang berhubungan sebab akibat (*causal empirical theories*).

4. Menjelaskan pembentukan teori empiris yang konsep-konsepnya berhubungan tetapi bukan dalam hubungan sebab akibat (*non-causal empirical theories*).
5. Menjelaskan peran kritik dan penelitian dalam pembentukan teori.

A. KOMPONEN PEMBENTUK TEORI POLITIK

Untuk membentuk teori politik, ada beberapa komponen yang harus dimengerti. Komponen yang pertama adalah konsep yang merupakan komponen terpenting untuk dapat memahami teori politik. Neumann (2014, h. 62) mendefinisikan konsep sebagai “komponen terpenting dalam sebuah teori yang substansinya adalah ide yang dipikirkan secara mendalam dan didefinisikan secara seksama yang kemudian menjadi bagian yang eksplisit dari sebuah teori”. Sementara Singarimbun dan Effendi (1981, h. 17) mendefinisikan konsep sebagai “abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”. Dari kedua definisi tersebut, dapatlah dikatakan bahwa manusia membentuk konsep dengan menggeneralisir ide dan fenomena agar menjadi lebih mudah dimengerti. Karena itu, semakin dekat sebuah konsep dengan realitas, maka akan semakin mudah konsep itu untuk diukur. Konsep itu sendiri memiliki keabstrakan yang bertingkat-tingkat. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ‘kursi’, ‘pohon’ atau ‘mobil’. Ketiga benda tersebut dinamakan seperti yang kita sebut sekarang setelah kita membuat abstraksi terhadap ketiga benda tersebut. Ketiga konsep tersebut akan kita rasakan perbedaannya apabila kita menyebut konsep ‘masyarakat’, ‘gerakan sosial’ ataupun ‘demokrasi’. Selain kita tahu bahwa kelompok konsep yang pertama lebih konkret daripada kelompok konsep yang kedua, kita juga dapat merasakan perbedaan tingkatan dari kedua kelompok konsep tersebut.

Komponen kedua dari sebuah teori adalah variabel. Variabel adalah konsep yang memiliki nilai dan karena itu dapat diukur (Neumann 2014; Hagul, Manning & Singarimbun 1981). Beberapa contoh dari variabel seperti tingginya pendapatan individu atau tingkat konsolidasi demokratisasi sebuah negara. Peneliti yang menggunakan variabel pendapatan individu dapat mengukur dengan menggunakan indikator seperti pendapatan tetap per bulan. Variabel tingkat konsolidasi demokratisasi sebuah negara dapat diukur dengan indikator seperti variasi institusi demokrasi (partai politik, kelompok kepentingan) dan tinggi/rendahnya partisipasi politik di negara tersebut yang mendukung berjalannya demokrasi prosedural di negara tersebut.

Selanjutnya baik Neumann (2014) dan Hagul et.al (1981) menjelaskan secara lebih terinci jenis-jenis variabel. Terdapat beberapa jenis variabel antara lain terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*), variabel bebas (*independent variable*), variabel yang mendahului (*antecedent variable*) dan *intervening variable*. Dalam sebuah penelitian tentang desain kelembagaan dan kinerja demokrasi dapat diasumsikan bahwa desain kelembagaan menjadi variabel bebas karena menentukan kinerja dari demokrasi (dalam hal ini kinerja demokrasi bertindak variabel terikat). Di samping kedua variabel yang saling mempunyai hubungan sebab akibat tersebut, terdapat variabel yang tidak

secara langsung tetapi diperlukan untuk menjelaskan hubungan dua atau lebih variabel. Variabel jenis ini disebut sebagai *intervening variable*. Contoh: korelasi yang positif antara kredibilitas calon anggota legislatif dengan jumlah pemilih. Meskipun tingkat kredibilitas tinggi (*independent variable*) tidak secara langsung akan mendapat jumlah pemilih (*dependent variable*) yang banyak. Ada variabel lain yang harus dilihat, yaitu intensitas kampanye yang merupakan *intervening variable*.

Hipotesis merupakan komponen berikutnya. Effendi (1981, h. 21-22) menjelaskan hipotesis adalah sebuah pernyataan tentang hubungan yang (mungkin) ditimbulkan antara dua atau lebih variabel yang diturunkan dari teori yang kemudian hipotesis ini di tes di lapangan. Sama halnya dengan Effendi, Neumann (2014, h. 69) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan hubungan antara variabel yang pada tingkat empiris akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis biasanya dalam bentuk “jika A maka B”, atau “rendahnya pengawasan pemerintah pada penerapan undang-undang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah”.

B. KONSEP-KONSEP YANG MEMBENTUK TEORI POLITIK

Bagian ini akan memperkenalkan secara singkat konsep-konsep yang digunakan dalam BMP ini. Pengenalan terhadap konsep-konsep ini diperlukan agar mahasiswa mulai memahami dengan konsep-konsep tersebut. Ada pun konsep-konsep yang akan dibahas mencakup antara lain: kekuasaan, otoritas, dan legitimasi; negara, kelas, dan elit; pilihan-pilihan rasional; modernisasi, pembangunan, dan ketergantungan; *civil society*, gerakan sosial baru dan feminisme; transisi demokrasi, representasi dan demokrasi. Konsep-konsep ini yang menjadi dasar teori-teori politik yang akan dibahas dalam BMP ini.

1. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membuat tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pemilik kekuasaan. Dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa inti atau substansi dari kekuasaan itu sendiri adalah hak untuk meminta atau bahkan memaksa orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang berkuasa.

Menurut Grigsby (2009, h. 43), kekuasaan didapatkan melalui empat tindakan cara: kekuasaan yang dilakukan dengan pemaksaan (secara fisik), persuasif, manipulasi, dan imbalan. Martin Luther King Jr. menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan massa untuk mencapai reformasi hak-hak sipil adalah contoh bagaimana penggunaan kekerasan untuk mendapatkan kekuasaan.

2. Otoritas

Kekuasaan tidak hanya memiliki ‘kemampuan’ agar orang yang dikuasai memenuhi keinginan yang berkuasa, namun juga disertai ‘hak’ untuk melakukan hal tersebut, itulah otoritas atau kewenangan. Ini yang membedakan antara kekuasaan

dengan wewenang, yakni adanya ‘hak’ yang diakui. Hak Angket DPR adalah contoh bagaimana DPR dapat melakukan penyelidikan tentang penerapan undang-undang oleh pemerintah.

3. Legitimasi

Legitimasi didefinisikan sebagai wewenang yang tidak saja dianggap sah secara hukum, namun juga mendapat pengakuan dan dukungan kepercayaan dari rakyat. Dari definisi ini terlihat cakupan wilayah dari legitimasi lebih luas, dalam arti pihak yang dikuasai lebih besar lagi dibandingkan dengan kekuasaan atau wewenang. Legitimasi lebih sering diacukan kepada eksistensi sebuah pemerintahan. Dalam penanganan korupsi misalnya, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga dapat menghukum koruptor dan tindakannya dilindungi undang-undang. KPK mempunyai legitimasi untuk melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi.

4. Negara

Negara dapat dikatakan sebagai konsep tertua karena telah menjadi fokus penelitian ilmu politik sejak ilmu politik ini ada. Sebelum Perang Dunia I, negara menjadi pusat kajian ilmu politik; karena itulah maka pendekatan pada masa itu disebut sebagai pendekatan kelembagaan.

Negara didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk mengendalikan masyarakat. Wewenang dan kekuasaan tertinggi dijalankan oleh sejumlah pejabat ini biasanya diselenggarakan atas dasar hukum. Negara, selain mampu menuntut ketaatan warga negaranya untuk mematuhi dasar hukum yang berlaku juga memiliki kekuasaan memaksa sebagai pemegang monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah di dalam wilayah negara tersebut.

5. Kelas

Pemikiran-pemikiran Marx tentang kelas menjadi awal dari pengonstruksian masyarakat dalam dua kategori: kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Posisi dominan dari kelas berkuasa ini didasarkan pada dominasi pemilikan alat-alat produksi. Konflik antara kelas yang berkuasa dengan kelas yang dikuasai terjadi secara terus-menerus mengikuti dialektika materialisme sejarah. Garis konflik kelas ditarik secara paling tegas dalam masyarakat kapitalis modern karena dalam masyarakat semacam itu pemisahan kepentingan-kepentingan ekonomi terlihat paling nyata mengingat adanya polarisasi antara pemusatan kekayaan yang luar biasa pada satu sisi dan pemusatan kemiskinan pada sisi yang lain. Dialektika tertinggi Marx menghasilkan masyarakat tanpa kelas ketika kelas kapitalis dikalahkan oleh kelas pekerja yang kemudian diikuti dengan terbentuknya masyarakat tanpa kelas.

6. Elit

Konsep dan teori elit muncul sebagai reaksi dari teori Marx. Para teoritis elit ini berargumentasi bahwa baik dalam masyarakat otoriter atau pun demokratis selalu terdapat suatu kelompok kecil yang berkuasa atas massa rakyat. Dengan begitu, selalu

ada unsur oligarki dalam kepemimpinan masyarakat. Kelompok kecil ini dinamakan “elit” dan merupakan minoritas kecil yang kohesif dan menjadi pimpinan bagi massa (kelompok masyarakat di luar kelompok elit yang tidak terorganisir dan apatis).

Sumber dari kekuasaan elit tidak terlalu menjadi pusat perhatian di awal perkembangan teori elit ini (awal abad ke-20). Namun di tahun 1960-an, teori elit diperluas dengan munculnya konsep “elit strategis” yang dikembangkan oleh Suzanne Keller (1963). Pengembangan konsep ini mengarah pada pengkhususan dari elit-elit di tiap bidang seperti politik, ekonomi, keilmuan, militer, budaya memiliki elit-elit khususnya tersendiri. Namun secara kolektif, elit-elit ini, di dalam masyarakat, dinamakan *ruling-class*.

7. Individu yang Rasional

Artinya seorang individu yang berpendidikan dan menggunakan rasionya secara baik dan benar sebagai acuannya dalam berperilaku; tentu hasilnya akan lebih baik dan bermanfaat dibanding dilakukan oleh individu yang melakukan aktivitasnya tanpa rasio atau berdasarkan emosional.

8. Modernisasi

Pengertian modernisasi umumnya dikaitkan dengan persepsi kemajuan dari sebuah negara dan digunakan dalam perbandingan antara negara miskin (yang biasanya adalah negara pertanian) dan negara kaya (negara industri).

9. Pembangunan Politik

Pembangunan politik ditekankan pada penguatan nilai-nilai dan praktik-praktik demokrasi kapitalis negara-negara Barat seperti partisipasi politik dan/ataupun praktik multipartai yang menunjang pembangunan ekonomi. Penelitian-penelitian empiris yang dilakukan oleh Lipset memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi dan legitimasi politik ketika pembangunan ekonomi memfasilitasi pembentukan dan keberlangsungan demokrasi (Lipset 1959). Lucian Pye (1965 dan 1966) berargumen sebaliknya, ketika demokrasilah yang memfasilitasi pembangunan ekonomi.

10. Ketergantungan

Teori ketergantungan memiliki hipotesis bahwa kemiskinan yang dialami negara-negara berkembang adalah akibat struktur perekonomian dunia yang eksploitatif sehingga surplus dari negara-negara ini beralih ke negara-negara industri maju. Perdagangan dunia yang bebas merupakan arena ketika eksploitasi ini terjadi.

11. Gerakan Sosial

Gerakan Sosial merupakan bentuk perilaku kolektif yang berakar dalam kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Gerakan ini bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Untuk

mencapai tujuannya, gerakan ini mendirikan berbagai kelompok yang memedulikan masalah-masalah baru seperti lingkungan, gerakan perempuan, hak asasi manusia, dan gerakan anti-nuklir. Di antara kelompok kepentingan itu ada yang bersifat sosial (seperti menyediakan air bersih), maupun yang lebih bersifat advokasi (seperti penegakan hak asasi).

Para aktivis gerakan ini sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat, dan merasa “terasingkan” (teralienasi) dari masyarakat. Untuk skala nasional, para aktivis gerakan ini menginginkan desentralisasi dari kekuasaan negara, desentralisasi pemerintah, partisipasi dalam peningkatan swadaya (*self help*) masyarakat, terutama masyarakat lokal. Dalam gerakan ini juga dibina interaksi dengan unsur-unsur kemasyarakatan lainnya termasuk dunia ekonomi dan industri. Bentuk-bentuk organisasi semacam ini sering dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

12. Feminisme

Feminisme merupakan sebuah gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah ada kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam ranah publik.

13. Transisi Demokrasi

Kebanyakan dari negara-negara Dunia Ketiga telah mengubah rancangan desain kelembagaannya dari sistem yang otoriter ke arah sistem yang demokratis. Tahap yang krusial dalam transisi ini terletak pada pengonsolidasian sistem yang demokratis tersebut. Banyak aspek yang dapat berkontribusi dalam tahap ini, antara lain peningkatan kondisi perekonomian yang menumbuhkan kelas menengah baru, perkembangan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi di kalangan masyarakat pada umumnya serta *good will* dari elit yang berkuasa.

14. Demokrasi dan Representasi

Selain konsep negara, konsep demokrasi merupakan konsep yang juga sudah ada sejak ilmu politik ada. Sejak abad ke-19, perkembangan demokrasi konstitusional telah bergeser dari penerapan *rule of law* yang *rigid* sampai menjadi penanggung jawab bagi terselenggaranya *welfare state* di abad ke-20.

Demokrasi konstitusional abad ke-21 ini memperluas cakupannya untuk meningkatkan representasi dalam sebuah sistem demokratis. Untuk itu, di samping diperlukan pemerintah, parlemen dan lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel, terdapat perhatian khusus *concern* dari penelitian-penelitian tentang bagaimana meningkatkan kualitas sistem representasi: mulai sistem kepartaian, sistem elektoral, dan keterwakilan, baik dari kelompok-kelompok atau unsur *civil society* lainnya termasuk media massa untuk pengawasan terhadap sistem representasi ini.

C. METODE PENELITIAN

Selain mempelajari komponen dan konsep-konsep yang dibahas dalam BMP ini, diperlukan pemahaman tentang metode penelitian. Sebagaimana disinggung di bagian awal dari modul ini, kritik merupakan salah satu cara untuk mengembangkan teori politik. Salah satu cara untuk melakukan kritik terhadap teori tersebut adalah dengan mentes kembali hipotesis-hipotesis dari teori-teori. Memahami metode penelitian berarti memahami cara untuk pengumpulan data, menginterpretasi data, menganalisis data, serta menginferensi data dalam rangka pengembangan teori politik.

Terdapat dua metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik dan kualitas dari objek-objek politik yang sedang diteliti. Metode kualitatif menggunakan cara membandingkan sejarah, pengamatan terlibat, dan wawancara mendalam dalam melakukan penelitian lapangan. Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan indikator-indikator kuantitatif dari fenomena politik yang kemudian berusaha untuk membangun hubungan-hubungan antara variabel-variabel dari periode yang berbeda atau pun dari negara yang berbeda. Metode kuantitatif menggunakan *survey* dengan kuesioner dan pengamatan berstruktur dalam pencarian datanya. Pengolahan data biasanya menggunakan program-program statistik tertentu, misalnya *Statistical Package of Social Sciences* (SPSS).

Data yang telah diperoleh, baik data kualitatif maupun data kuantitatif, pada tahap pertama haruslah memahami data tersebut dengan menginterpretasi atau mendeskripsikan apa yang diperlihatkan oleh data tersebut. Setelah memahami data tersebut, barulah kemudian dianalisis dan diinferensikan dengan menggunakan teori yang digunakan. Inferensi adalah kesimpulan yang didapat dari bukti dan analisis penelitian. Inferensi merupakan proses yang terus-menerus dilakukan ilmuwan politik untuk membuat pernyataan tentang sesuatu yang mereka tidak tahu dengan menggunakan fakta-fakta yang mereka ketahui tentang dunia ini. Inferensi-inferensi ini secara berkesinambungan dilakukan dalam usaha untuk pembentukan teori politik. Inferensi-inferensi terus dilakukan ketika ilmuwan politik mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menguji hipotesis, dan membuat prediksi.

Dengan melakukan inferensi-inferensi secara berkesinambungan ini maka ilmuwan politik mampu mencapai generalisasi yang paling tinggi derajatnya, yaitu teori politik. Salah satu contoh teori politik adalah *Underdevelopment Theory* dari Dos Santos yang masih relevan hingga sekarang. Salah satu generalisasi yang Santos dapatkan adalah bahwa keterbelakangan di negara-negara satelit terjadi justru karena negara-negara ini bergabung dengan sistem ekonomi internasional atau kapitalisme.

D. PEMBENTUKAN *CAUSAL EMPIRICAL THEORIES*

Apabila dikaitkan dengan paradigma yang telah dibahas di KB 1 maka pembentukan *causal empirical theories* mendasarkan pada paradigma positivis. Teori-teori yang dihasilkan adalah bagian dari proses menemukan hukum alam. Di dalam penggunaannya untuk menjelaskan fenomena politik, teori-teori tersebut, kemudian diuji dengan logika deduktif dan menggunakan metode kuantitatif.

Ilmu politik dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan karena kemampuannya untuk:

1. membandingkan dengan deskripsi, klasifikasi, tes hipotesis, dan prediksi;
2. memperbandingkan ini juga mengindikasikan kemampuan untuk menjelaskan, membentuk teori, dan prediksi; dan
3. menggunakan metode ilmiah yang diadopsi dari ilmu alam, misalnya mengumpulkan data secara sistematis, mencari pola-pola yang nyata dalam data dan memformulasikan teori untuk menjelaskan pola-pola tersebut.

Sejak awal penelitian terhadap sebuah fenomena dilakukan, peneliti memulai dengan sebuah teori ketika dari teori tersebut diformulasikan permasalahan dan pertanyaan penelitian. Setelah itu, formulasi permasalahan dan pertanyaan penelitian tersebut diturunkan ke dalam variabel-variabel yang berhubungan secara sebab-akibat. Proses selanjutnya adalah memformulasikan dalam bentuk hipotesis untuk dites dengan data empiris di lapangan. Cara penurunan dari sebuah teori menjadi permasalahan dan pertanyaan penelitian, variabel-variabel, hipotesis lalu di tes di lapangan merupakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir yang deduktif ini biasanya dikombinasikan dengan metode penelitian kuantitatif, ketika data akan dianalisis dengan bantuan statistik. Hasil dari perhitungan statistik tersebut, kemudian diabstraksikan kembali kepada kerangka teori awal untuk menjawab apakah penurunan teori ke permasalahan dan pertanyaan penelitian tepat, atau sebaliknya. Dengan kata lain, verifikasi dilakukan dengan perhitungan-perhitungan statistik. Data lapangan pun dideskripsikan secara kontekstual, klasifikasi, di tes hipotesis, dan dijadikan landasan untuk membuat prediksi. Penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut beserta contohnya diuraikan pada paragraf-paragraf berikut ini.

Deskripsi, bertujuan untuk menceritakan apa yang terjadi (*telling the story*), tetapi tidak untuk membuat inferensi yang lebih luas.

Sebagai contoh:

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 sebagai pemilihan kepala daerah yang sangat kompleks. Hal ini terjadi karena melibatkan isu-isu yang sangat sensitif dan membuat Komisi Penyelenggara Pemilu DKI harus melaksanakan tugasnya secara lebih bijaksana pada pemilihan kepala daerah tersebut untuk mengantisipasi masalah-masalah yang muncul.

Dalam deskripsi tentang pilkada tersebut, peneliti hanya menceritakan saja tanpa memberikan inferensi terhadap apa yang mungkin terjadi.

Klasifikasi adalah komponen yang diperlukan untuk sebuah perbandingan yang sistematis. Klasifikasi memperlihatkan tingkat perbandingan yang lebih tinggi dibandingkan deskripsi kontekstual karena mengelompokkan negara-negara, sistem-sistem politik, atau pun kejadian-kejadian ke dalam kategori yang mempunyai karakteristik-karakteristik yang sama. Klasifikasi yang baik haruslah memiliki kategori-kategori yang terdefinisi dengan baik sehingga mampu mengorganisir fakta-fakta empiris.

Sebagai contoh:

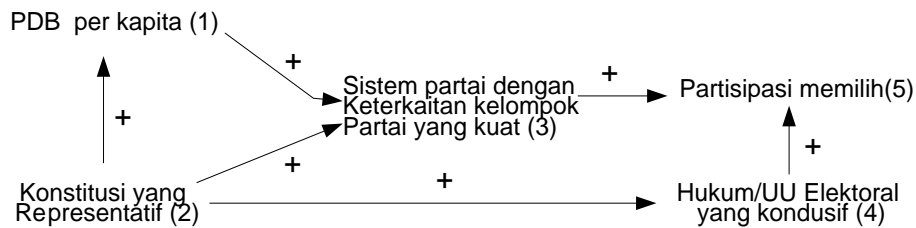
Aristoteles melakukan klasifikasi dengan membagi negara ke dalam enam tipe negara yang didasarkan pada kombinasi bentuk dari peraturan dengan jumlah pemimpin.

		Jumlah Pemimpin		
		Satu	Beberapa	Banyak
Baik		Monarki	Aristokrasi	<i>Polity</i>
		Tirani	Oligarki	Demokrasi
Korup				

Sumber: Landman 2000, *Bagan 1.1 h.7*

Gambar 1.1
Klasifikasi Negara Aristoteles

Melakukan **tes hipotesis** merupakan usaha untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hal-hal yang telah dideskripsikan dan diklasifikasikan. Ilmuwan politik berangkat dari teori tertentu, menurunkan hipotesis (dalam hubungan antarvariabel) dan mengujinya dengan data empiris. Usaha ini dimaksudkan untuk membangun teori-teori dalam ilmu politik secara lebih komprehensif.



Gambar 1.2
Hipotesis Kunci Partisipasi Memilih Powell (1982)

Powell (1982) dalam bukunya *Contemporary Democracies* sebagaimana dikutip oleh Landman (2000) meneliti sejumlah hipotesis kunci yang berkaitan dengan partisipasi memilih di 29 negara demokratis. Partisipasi diukur dengan menggunakan *voter turnout* atau persentase dari jumlah pemilih yang seharusnya dapat memilih dibagi dengan mereka yang datang ke tempat pemilihan dalam sebuah pemilihan tingkat nasional. Powell berpendapat bahwa partisipasi pemilih seharusnya lebih tinggi di negara-negara yang memiliki: (1) tingkat pembangunan ekonomi lebih tinggi (PDB per kapita), (2) konstitusi yang representatif, undang-undang pemilu yang memfasilitasi pemilih dan sistem partai yang memiliki keterkaitan dengan kelompok-kelompok di masyarakat (Powell 1982 sebagaimana dikutip oleh Landman 2000, h. 9). Analisis statistik dari ke-29 negara ini menunjukkan pengaruh yang positif dari seluruh variabel tersebut terhadap partisipasi pemilih seperti terlihat dalam gambar di atas.

Selanjutnya, Ilmuwan politik membuat **prediksi** tentang *political outcomes* di masa mendatang berdasarkan generalisasi setelah melewati tahap-tahap deskripsi, klasifikasi, dan pengujian hipotesis. Biasanya prediksi tersebut disajikan dalam bentuk pernyataan yang sifatnya *probabilistic* seperti “negara yang memiliki sistem representasi proporsional cenderung memiliki banyak partai politik”. Contoh: Rueschmeyer *et. al.* (1992) membandingkan pengalaman-pengalaman sejarah dari negara-negara industri maju dengan negara-negara berkembang untuk menjelaskan hubungan antara perkembangan kapitalis (*capitalist development*) dan demokrasi.

E. PEMBENTUKAN NON-CAUSAL EMPIRICAL THEORIES

Pembentukan teori empiris yang konsep-konsepnya berhubungan, tetapi bukan dalam hubungan sebab akibat (*non-causal empirical theories*) yang terbentuk secara induktif juga berkontribusi dalam pembentukan teori. Tahapan-tahapan seperti melakukan deskripsi dan klasifikasi juga dijalankan. Dua tahap lainnya seperti menguji hipotesis dan membuat prediksi tidak sepenuhnya dilakukan karena bukan tujuan dari teori jenis ini untuk melakukan kedua hal tersebut.

Peneliti yang membangun teori politik jenis ini, menggunakan cara berpikir induktif. Dengan cara berpikir induktif, peneliti tidak memulai penelitiannya dengan teori. Sebaliknya, peneliti ini membangun dari pengamatan-pengamatan dan deskripsi dari pengamatan yang spesifik untuk membangun permasalahan-permasalahan atau

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Konsep-konsep yang dipakai memang tidak diarahkan untuk membentuk sebuah hubungan sebab dan akibat. Keingintahuan peneliti dibangun secara bertingkat-tingkat ini sampai pada satu tahap ia menentukan kasus-kasus apa yang akan dijadikan fokus penelitian.

Jadi, berbeda dengan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*), baru setelah itu peneliti menentukan informan-informan kunci untuk mendapatkan data. Dari data dan pengamatan terlibat dan dalam kurun waktu yang ditetapkan peneliti, dibuatlah sebuah generalisasi atau teori yang khusus berlaku untuk kasus tersebut. Di sini lah letak perbedaan jenis teori yang dihasilkan. Teori jenis ini sering disebut juga sebagai *pattern of theories*, yaitu “sebuah pola ketika pemikiran-pemikiran saling menyambung sebagai sebuah kesatuan. *Pattern of theories* ini tidak menekankan cara berpikir deduktif dan hubungan antar konsep bukan hubungan yang bersifat sebab akibat...” (Neumann 1991, h. 38 sebagaimana dikutip oleh Creswell 2014). Dengan perkataan lain, analisis data dari *case study research* dapat menghasilkan *pattern of theories* yang menghasilkan teori-teori yang generalisasinya terbatas pada kasus tersebut. Dapat dikatakan teori yang dihasilkan adalah *middle range theory*. Biasanya teori jenis ini digunakan untuk mencari pola-pola teori politik yang ingin meneliti mengenai isu-isu politik yang baru seperti nasionalisme di daerah perbatasan, anggaran daerah yang berperspektifkan gender atau pun pemberantasan korupsi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan *good governance*.

Landman (2000) berpendapat bahwa studi kasus satu negara dapat berguna untuk menghasilkan sebuah hipotesis untuk teori-teori yang belum secara utuh terbentuk. Penelitian-penelitian ini dapat secara eksplisit dan implisit mengusulkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan hipotesis untuk penelitian yang lebih besar sifatnya seperti membandingkan beberapa negara. Penelitian O’Donnell (1973) tentang otoriterisme di Argentina diuji dalam penelitian yang lebih besar untuk wilayah Amerika Latin (Collier 1979). Hipotesis yang diuji adalah hubungan antara tahap khusus dari pembentukan kapitalis yang dependen dengan munculnya negara otoriter birokratik. Contoh ini memperlihatkan bahwa hasil penelitian dari sebuah studi kasus dapat dijadikan sebagai hipotesis dalam penelitian yang lebih besar oleh peneliti lain. Kalau hipotesis tersebut ditolak berarti perlu ada penelitian baru untuk mencari jawaban yang baru.

F. KRITIK, PENELITIAN DAN ALASAN PILIHAN TEORI POLITIK

Teori politik, baik yang mengandung hubungan sebab akibat maupun tidak, memiliki kemungkinan yang sama untuk dikritik, kemudian dilengkapi atau pun dinegasikan. Penelitian yang dilakukan O’Donnell yang kemudian dilanjutkan oleh Collier dan kawan-kawannya merupakan contoh yang tepat untuk memulai pembahasan tentang peran penelitian dan kritik akademisi dalam pembentukan teori.

Bagaimana penelitian-penelitian dan kritik akademisi berperan dalam pembentukan teori? Fenomena-fenomena politik baru bermunculan yang diterjemahkan ke dalam topik-topik dan masalah-masalah baru dalam ilmu politik. Menjadi kewajiban para peneliti untuk meneliti fenomena-fenomena politik baru tersebut. Hal positif

yang dapat diperlihatkan menggembarakan dari munculnya fenomena-fenomena ini menantang para ilmuwan politik untuk menjelaskan dengan teori-teori politik. Jika tidak dapat menjelaskan fenomena tersebut dengan teori-teori politik yang ada maka kewajiban dari para ilmuwan politik ini lah untuk mengembangkan teori-teori yang ada atau membentuk teori baru. Disini lah penelitian-penelitian dan kritik akademisi berperan dalam pembentukan teori.

Beberapa fenomena politik baru dapat digambarkan dalam topik-topik dan pertanyaan-pertanyaan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Topik Baru dan Pertanyaan yang Muncul

No.	Topik Baru	Pertanyaan yang Muncul
1.	Pembangunan ekonomi dan demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah pembangunan ekonomi menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan munculnya demokrasi? ▪ Sekali demokrasi sudah terbentuk, apakah performa ekonomi yang berkesinambungan membantu melanggengkan institusi-institusi demokratis?
2.	Perbedaan pendapat yang berakibat kepada kekerasan politik (<i>violent political dissent</i>) dan revolusi sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sektor masyarakat manakah yang lebih cenderung untuk melakukan pemberontakan? ▪ Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap suksesnya revolusi sosial?
3.	Perbedaan pendapat yang tidak berakibat kepada kekerasan politik (<i>non-violent political dissent</i>) dan gerakan-gerakan sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengapa gerakan-gerakan sosial itu muncul? ▪ Bagaimana mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka? ▪ Tujuan apakah yang mereka usahakan untuk dicapai?
4.	Transisi ke arah demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan referensi kepada gelombang ketiga demokrasi, mengapa beberapa negara yang tadinya otoriter mengalami transisi ke arah demokrasi? ▪ Faktor-faktor eksternal apa yang membantu mempromosikan transisi negara ke arah demokrasi?
5.	Desain kelembagaan dan kinerja yang demokratis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimanakah pengaturan lembaga-lembaga eksekutif-legislatif? ▪ Sejauh manakah sistem elektoral dapat mendukung demokrasi sebuah negara? ▪ Desain sistem partai politik seperti apakah yang berkaitan erat dengan sistem elektoral yang demokratis?
6.	Media sosial dan pemilu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sejauh mana media sosial dapat memengaruhi pilihan seseorang dalam pemilu? ▪ Bagaimana penggunaan <i>big data</i> dalam Kampanye politik?
7.	Disintegrasi internasional dan politik massa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana pengaruh peningkatan tren disintegrasi internasional terhadap politik dalam negeri sebuah negara? ▪ Bagaimana kaitan disintegrasi negara-negara dengan keinginannya untuk menarik diri dari campur tangan AS? ▪ Apakah diintegrasi internasional akan mendorong kerja sama internasional?

No.	Topik Baru	Pertanyaan yang Muncul
8.	Implikasi politik dari krisis finansial dan kaitannya dengan era pasca-demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana mengatasi dilema dengan mendominasinya korporasi dalam pembentukan politik global? ▪ Bagaimana politik gerakan masyarakat sipil memiliki kekuatan untuk menyelesaikan isu dominasi korporasi? ▪ Bagaimana peran korporasi terhadap proses demokrasi suatu negara?
9.	<i>Global warming</i> dan politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sejauh mana isu <i>global warming</i> memengaruhi kebijakan sebuah negara? ▪ Sejauh mana pembentukan kesepakatan akan kebijakan energi global? ▪ Perbandingan sikap politik tiap negara dalam merespons perubahan iklim
10.	<i>Islam dalam politik kontemporer</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana kebangkitan gerakan Islam memengaruhi pembentukan agenda internasional (Barat)?

Sumber: Disarikan dari Landman (2000), bab 4 - bab 8

Tabel 1.2 memperlihatkan usaha-usaha dari penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap fenomena-fenomena politik baru yang pada akhirnya memberikan sumbangan terhadap pembentukan teori politik. Selain penelitian-penelitian, kritik-kritik sesama akademisi terhadap keakuratan data, formulasi dari hipotesis atau pun pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, generalisasi, atau pun kesimpulan juga memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan dan pembentukan teori baru.

Salah satu contoh teori yang banyak dikritik adalah teori sistem, struktur, dan fungsi dari Gabriel Almond. Teori yang digagas tahun 1966 sampai dengan buku *Comparative Politics Today: A World View* tahun 1996 diterbitkan untuk edisi yang keenam, teori itu tetap bertahan, bahkan dapat menjawab kritik-kritik yang dilontarkan terhadap teori tersebut.

Kritik utama yang dilontarkan terhadap teori sistem, struktur, dan fungsi ini adalah (Almond dan Powell, Jr. 1996, h. 22):

1. teori ini statis dan konservatif di dalam metodologinya;
2. teori ini bias, selalu berpihak dalam *status quo* karena hanya mendeskripsikan seperangkat institusi pada waktu tertentu.

Menjawab kritik-kritik tersebut, Almond dan Powell, Jr. berargumentasi sebagai berikut. *Pertama*, alasan mengapa teori ini mengutamakan pendeskripsian dan perbandingan untuk menjelaskan institusi-institusi politik dan proses-prosesnya adalah tepat sebagai usaha untuk memahami institusi-institusi politik dan proses-proses di dalamnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, Almond dan Powell Jr. menggunakan teori ini untuk membandingkan mulai rezim Nazi Jerman hingga negara kesejahteraan Swedia.

Kedua, Almond dan Powell Jr. pun mengakui bahwa teori ini harus dilengkapi dengan pendekatan pembangunan yang dinamis supaya dapat menjelaskan bukan saja *bagaimana* institusi-institusi politik berfungsi dengan baik, tetapi juga harus dapat

menjelaskan *mengapa* fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Almond dan Powell Jr. memberi contoh bahwa analisis struktur fungsi tidak dapat menjelaskan *mengapa* Jerman atau Perancis dapat berkembang seperti yang sekarang kita lihat. Perubahan-perubahan tersebut menginformasikan kepada kita apa saja yang berubah di rezim-rezim tersebut. Tetapi penjelasan *mengapa* mereka berubah harus dicari melalui konteks ekonomi, sosial, budaya, dan internasional sehingga memperlihatkan analisis historis yang dinamis.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi kritik sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan teori politik. Selain kritik, penelitian-penelitian tentang fenomena-fenomena kontemporer juga membantu untuk mengembangkan teori politik.

Dalam BMP ini akan dibahas tujuh teori yang memiliki tingkatan yang berbeda, yaitu teori makro (*grand level theory*) dan teori meso (*middle range theory*). Ada pun ketujuh teori tersebut sebagai berikut.

1. Teori sistem politik, teori struktural fungsional, dan teori kelas yang merupakan *grand theory*.
2. Teori pilihan rasional sebagai *grand theory*, *game theory*, dan *exchange theory*, serta *public choice theory* dan *collective action theory* yang merupakan *middle range theory*.
3. Teori negara yang dilihat dari perspektif pluralis, elit dan kelas sebagai *middle range theory*.
4. Teori pembangunan (modernisasi) dan keterbelakangan (ketergantungan) sebagai *grand theory*.
5. Teori-teori ekonomi politik: oligarki dan klientelisme dilihat dari perspektif budaya dan kelas yang merupakan *middle range theory*.
6. Teori-teori transisi menuju demokrasi yang merupakan *middle range theory*.
7. Teori-teori demokrasi dan representasi yang merupakan *grand theory* dan *middle range theory*.
8. Teori-teori *civil society*, gerakan sosial, dan feminisme yang merupakan *grand theory*.

Ada pun alasan untuk mempelajari teori-teori politik dengan tingkatan teori yang berbeda dalam BMP ini agar mahasiswa dapat mempelajari dan menggunakan *grand theory* sebagai konteks untuk mengerti isu atau topik yang ditelitinya dan memilih *middle range theory* sebagai alat untuk menganalisis (*tools of analysis*) masalah dalam fenomena yang ditelitinya.



Latihan

- 1) Apakah perbedaan antara konsep dan variabel?
- 2) Formulasikan sebuah hipotesis yang berkaitan dengan konsep kebijakan publik dan representasi!
- 3) Jelaskan perbedaan antara deskripsi dan klasifikasi dalam rangka pembentukan teori politik!
- 4) Jelaskan bagaimana teori politik terbentuk dalam *non-causal empirical political theories*!
- 5) Jelaskan bagaimana kritik dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan teori politik!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Konsep menurut Miriam Budiardjo adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk “mengerti” dunia sekelilingnya. “Mengerti” itu hanya dapat dicapai melalui pikiran (*mind*) kita. Konsep adalah konstruksi mental, suatu ide yang abstrak, yang menunjuk pada beberapa phenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik, yang dimiliki oleh phenomena itu. Jadi, konsep adalah abstraksi dari atau mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas. Atas dasar konsep atau seperangkat konsep dapat disusun atau dirumuskan generalisasi. Biasanya konsep dirumuskan dalam satu atau dua kata. ”Berbeda dengan konsep, variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai karena itu dapat diukur. Sebagai contoh, misalnya konsep partisipasi politik dan variabelnya adalah tingkat partisipasi politik.
- 2) Hipotesis antara kebijakan publik dan representasi ditimbulkan antara dua atau lebih variabel yang diturunkan dari teori; selanjutnya hipotesis ini di tes di lapangan. Hipotesis sering juga disebut jawaban sementara. Demokrasi dan representasi baru lah merupakan konsep, belum lah berupa variabel. Oleh karena itu, haruslah konsep-konsep tersebut diturunkan menjadi variabel-variabel terlebih dahulu untuk kemudian ditentukan variabel mana yang akan menjadi variabel terikat dan mana yang menjadi variabel bebas.

Contoh hipotesisnya adalah:

Meningkatnya *persentase* perempuan di parlemen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pembuatan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan.

- 3) Deskripsi berarti menggambarkan dan memaparkan apa yang terjadi sehingga pembaca dapat membayangkan kejadian atau proses yang sedang diamati peneliti. Klasifikasi adalah satu tahap lebih tinggi dari deskripsi karena klasifikasi berarti membuat kategori-kategori dari data yang didapat melalui pendeskripsian. Pembentukan teori empiris yang konsep-konsepnya berhubungan, tetapi bukan dalam hubungan sebab akibat (*non-causal empirical theories*) yang terbentuk secara induktif juga berkontribusi dalam pembentukan teori. Tahapan-tahapan seperti melakukan deskripsi dan klasifikasi juga dijalankan. Dua tahap lainnya seperti men-tes hipotesis dan membuat prediksi tidak sepenuhnya dilakukan karena bukan tujuan dari teori jenis ini untuk melakukan kedua hal tersebut.
- 4) Peneliti yang membangun teori politik jenis ini, menggunakan cara berpikir induktif. Dengan cara berpikir induktif, peneliti tidak memulai penelitiannya dengan teori. Sebaliknya, peneliti ini membangun dari pengamatan-pengamatan dan deskripsi dari pengamatan tersebut untuk membangun permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Konsep-konsep yang dipakai memang tidak diarahkan untuk membentuk sebuah hubungan sebab dan akibat. Keingintahuan peneliti dibangun secara bertingkat-tingkat ini sampai pada satu tahap ia menentukan kasus-kasus apa yang akan dijadikan fokus penelitian. Jadi, berbeda dengan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini mendasarkan pada studi kasus (*case study*) baru, setelah itu menentukan informan-informan kunci untuk mendapatkan data. Dari data dan pengamatan terlibat dan dalam kurun waktu yang ditetapkan peneliti, dibuatlah sebuah generalisasi atau teori yang khusus berlaku untuk kasus tersebut. Di sini lah letak perbedaan jenis teori yang dihasilkan. Teori jenis ini sering disebut juga sebagai *pattern of theories*, yaitu “sebuah pola ketika pemikiran-pemikiran saling menyambung sebagai sebuah kesatuan. *Pattern of theories* ini tidak menekankan cara berpikir deduktif dan hubungan antar konsep bukan hubungan yang bersifat sebab akibat. ”Dengan perkataan lain, analisis data dari *case study research* dapat menghasilkan *pattern of theories* yang menghasilkan teori-teori yang generalisasinya terbatas pada kasus tersebut, bukan menghasilkan sebuah *grand theory*.
- 5) Kritik-kritik sesama akademisi terhadap keakuratan data, formulasi dari hipotesis atau pun pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, generalisasi atau pun kesimpulan juga memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan dan pembentukan teori baru.



Rangkuman

1. Dalam rangka memahami teori-teori politik mahasiswa perlu memahami, -komponen pembentuk teori-teori politik. Komponen-komponen itu seperti *konsep, variabel, hipotesis*. Selain komponen-komponen tersebut mahasiswa juga perlu memahami *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* yang berkaitan erat terhadap pencarian data, analisis data, dan inferensi dalam rangka pembentukan teori.
2. Pengenalan secara singkat mengenai konsep-konsep sangat penting bagi mahasiswa. Ada pun konsep-konsep yang dibahas mencakup antara lain kekuasaan, otoritas, dan legitimasi, negara, kelas, elit, pilihan-pilihan rasional, modernisasi, pembangunan, ketergantungan, *civil society*, gerakan sosial baru, feminisme, transisi demokrasi, representasi, dan demokrasi.
3. Pembentukan teori empiris dengan konsep-konsep atau variabel-variabelnya yang berhubungan sebab akibat (*causal empirical theories*), terbentuk secara deduktif serta menggunakan metode kuantitatif.
4. Pembentukan teori empiris yang konsep-konsepnya berhubungan, tetapi bukan dalam hubungan sebab akibat (*non-causal empirical theories*), terbentuk secara induktif dengan menggunakan metode kualitatif.
5. Peran penelitian dan kritik dari para ilmuwan politik juga mahasiswa sebagai calon akademisi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan dan pembentukan teori politik baru.



Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hal yang membedakan konsep dari variabel adalah
 - A. konsep diformulasikan berdasarkan cara berpikir yang induktif, sedangkan variabel dibentuk berdasarkan cara berpikir yang deduktif.
 - B. konsep merupakan abstraksi untuk dapat mengerti dunia, sedangkan variabel adalah konsep yang sudah diberi nilai sehingga dapat diukur di dalam sebuah hubungan sebab akibat.
 - C. konsep terdiri atas dua kata, sedangkan variabel terdiri dari lebih dua kata.
 - D. konsep mencerminkan karakteristik spesifik dari sebuah fenomena, sedangkan variabel mencerminkan keseluruhan sifat umum dari sebuah fenomena.
- 2) Berikut ini bentuk hipotesis yang paling tepat adalah
 - A. Institusi-institusi demokratis dan pembangunan ekonomi.
 - B. Pelembagaan partai politik berpengaruh terhadap sistem pengaderan dalam partai politik.

- C. Meningkatnya prosentase perempuan di parlemen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pembuatan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan.
 - D. Faktor-faktor eksternal sebuah negara membantu dalam percepatan transisi demokrasi di negara tersebut.
- 3) Berikut ada beberapa pernyataan
- a. Memformulasikan pertanyaan-pertanyaan penelitian dari pengamatan-pengamatan dan deskripsi.
 - b. Menentukan studi kasus.
 - c. Melakukan pencarian data dalam studi kasus.
 - d. Menarik abstraksi dari data yang dihasilkan dari studi kasus tersebut untuk menghasilkan *pattern of theories*.
 - e. Memformulasikan permasalahan dan pertanyaan penelitian dari teori.
 - f. Merumuskan hipotesis dalam hubungan antara variabel-variabel.
 - g. Menguji hipotesis di lapangan dalam pencarian data.
 - h. Menganalisis data dan melakukan verifikasi data dengan statistik.
 - i. Membuat generalisasi dari data dengan mengaitkan lagi dengan teori.

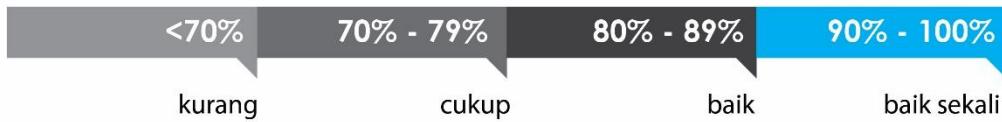
Dari pernyataan di atas, urutan tahap pembentukan *non-causal empirical theories* yang benar adalah

- A. a-b-c-d.
 - B. e-f-g-h-i.
 - C. e-b-c-h-i.
 - D. e-f-g-b-c-d.
- 4) Kritik dapat membantu pembentukan teori politik, sebab
- A. setiap teori mempunyai kelemahan.
 - B. teori lama sering dianggap tidak *up date*.
 - C. teori baru sering dianggap lebih baik.
 - D. dianggap sesuatu yang progresif.
- 5) Teori Sistem, Struktural, dan Fungsional dari Gabriel Almond dapat dikategorikan sebagai *grand theory* karena teori tersebut memiliki sifat ... yang dapat dipakai untuk menganalisis sistem politik mana pun.
- A. *complicated*.
 - B. *parsimonous*.
 - C. *condusive*.
 - D. *comprehensive*.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B nilai.
- 2) C ideologi politik.
- 3) A deduktif.
- 4) D analisis terhadap institusi-institusi politik yang mendukung demokratisasi.
- 5) B sangat mudah untuk mengerti kapan dan dalam lingkungan apa yang dapat mentransformasi sebuah teori politik atau pun filsafat politik menjadi sebuah ideologi politik.

Tes Formatif 2

- 1) B konsep merupakan abstraksi untuk dapat mengerti dunia, sedangkan variabel adalah konsep yang sudah diberi nilai sehingga dapat diukur di dalam sebuah hubungan sebab akibat.
- 2) C Meningkatnya prosentase perempuan di parlemen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pembuatan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan.
- 3) A a-b-c-d.
- 4) A setiap teori mempunyai kelemahan.
- 5) B *parsimonous*.

Daftar Pustaka

- Almond, G., & Powell, G.B. Jr. (1996). *Comparative politics today: A world view*. 6th ed. New York: Harper Collins Publishers Inc.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chilcote, R. (1981). *Theories of comparative politics: The search of paradigm*. Colorado: West View Press.
- Craib, I. (1984). *Modern social theories: From Habermas to Parsons*, terj. S. Simamora (1986). Jakarta: CV Rajawali.
- Effendi, S. (1981). Unsur-unsur Penelitian Ilmiah. Dalam *Metode Penelitian Survei*, ed. Singarimbun, M. dan Effendi, S. 12-24, Jakarta: LP3ES.
- Goodin, R.E., & Klingemann, H. eds. (1996). *A new handbook of political science*. Oxford: Oxford University Press.
- Grigsby, E. (2009). *Analyzing politics: An introduction to political science*. Belmont: Cengage Learning.
- Hagul, P., Manning, C., & Singarimbun, M. (1981). dalam Singarimbun, M., & Effendi, S. eds (1981). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES, h. 25-43.
- Landman, T. (2000). *Issues and methods in comparative politics: An introduction*. London, New York: Routledge.
- Macridis, R.C. (1983). *Contemporary political ideologies: Movements and regimes*. Boston: Little, Brown and Company.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Marsh, D., & Stoker, G. eds (1995). *Theory and methods in political science*. London: MacMillan Press Ltd.
- Mills, C.W. (1959). *The sociological imagination*. Oxford: Oxford University Press.

Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Essex: Pearson Education Limited.

Neuman, W. L. (1997). *Social research methods: Methods qualitative and quantitative approaches*. 3rd ed. Allyn & Bacon.

Rueschmeyer, D. *et.al.* (1992). *Capitalist development dan democracy*. Chicago: Chicago Press.

Singarimbun, M., & Effendi, S. ed. (1981). *Metode penelitian survai*. Jakarta: LP3ES.

Van Evera, S. (1997). *Guide to methods for students of political science*. Ithaca: Cornell University Press.

<https://www.ssc.wisc.edu/~jpiliavi/357/theory.white.pdf>